

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan-pengetahuan (Sugiyono, 2012). Kajian ini memuat teori-teori, hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti lain dan publikasi umum yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian atau mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan variabel-variabel yang akan diteliti.

Dalam kajian ini akan memuat teori-teori tentang Bank Umum di Indonesia, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Non Performing Loan* (NPL), Kredit, *BI rate*, Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan *Capital Buffer*.

Teori-teori tersebut diperoleh melalui sumber buku-buku ilmiah, laporan penelitian sebelumnya, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber tertulis maupun media elektronik. Sehingga akan dapat menjadi sebuah dasar teori untuk mendukung objek-objek yang akan diteliti.

2.1.1 Bank Umum

2.1.1.1 Pengertian dan Peran Bank

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai : “Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”

Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah : “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank terbagi menjadi 2 jenis yaitu bank sentral dan bank umum. bank sentral merupakan bank yang mengatur seluruh kegiatan perbankan dan keuangan di suatu negara. Sedangkan bank umum merupakan bank yang melayani dan menawarkan berbagai jasa perbankan kepada masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana.

Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Menurut UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lain, fungsi bank sentral yaitu sebagai bank dari pemerintah dan bank dari bank umum sekaligus untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah, adapun tugas bank sentral antara lain sebagai berikut :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembiayaan.
3. Stabilitas sistem keuangan.

Peran dari bank sentral dalam perekonomian Indonesia meliputi :

1. Sebagai bank sirkulasi, bank sentral berperan untuk menciptakan dan mengedarkan mata uang, baik uang logam maupun uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah.
2. Sebagai *banker's bank*, artinya peran bank sentral adalah sebagai sumber dana bagi bank-bank lain.
3. Sebagai *lender of last resort*, artinya bank sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank lain.
4. Sebagai pelaksana kebijakan moneter.
5. Sebagai penjaga posisi likuiditas negara.

Sedangkan bank umum sering disebut sebagai bank komersial, bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas bank umum secara lengkap meliputi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya, adapun fungsi bank umum antara lain sebagai berikut :

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan.
2. Memberikan kredit pada masyarakat.

Peranan bank umum dalam kegiatan perekonomian antara lain adalah :

1. Sebagai sarana perantara keuangan, bank umum menghimpun dana dalam berbagai bentuk dari pihak yang memiliki banyak sumber

keuangan, kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dalam berbagai bentuk kredit dan pinjaman.

2. Sebagai pencipta uang giral, bank umum memiliki hak untuk mengeluarkan uang giro seperti bilyet giro dan cek.
3. Sebagai pengelola lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa perbankan lainnya, seperti transfer, hingga pembayaran tagihan air dan listrik.

Oleh karena itu pentingnya fungsi, tugas dan peran dari bank sentral dan umum dalam perkembangan kegiatan perekonomian di suatu negara karena bank sentral sebagai sumber dana bagi bank umum dan bank umum menjadi sumber dana bagi masyarakat yang membutuhkan peminjaman modal.

2.1.1.2 Kegiatan Usaha Bank Berdasarkan Modal Inti

Ditetapkannya peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank yaitu dalam rangka menghadapi dinamika regional dan global, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara optimal dan berkesinambungan, juga untuk peningkatan ketahanan, daya saing serta efisiensi industri perbankan nasional dari ancaman risiko dari eksternal maupun operasional bank. Penguatan modal bank juga untuk mengantisipasi risiko yang ditimbulkan oleh kompleksitas kegiatan usaha dan agar pembukaan jaringan kantor tidak menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat serta penguatan dan daya saing dari perbankan tersebut perlu diikuti dari peningkatan peran bank sebagai lembaga intermediasi khususnya untuk usaha produktif termasuk untuk

pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga industri perbankan nasional berperan aktif bagi kemajuan perekonomian nasional.

Modal inti bank merupakan modal bank yang terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak, setelah dikurangi muhibah (*goodwill*) yang ada dalam pembukuan bank dan kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dan jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (Kamus BI).

Berdasarkan modal inti yang dimiliki Bank dikelompokkan dalam 4 kelompok usaha (Bank Umum Kelompok Usaha – BUKU) sebagai berikut.

1. BUKU 1, Bank dengan modal inti kurang dari Rp 1 Triliun.
2. BUKU 2, Bank dengan modal inti Rp1 Triliun sampai dengan kurang dari Rp 5 Triliun.
3. BUKU 3, Bank dengan modal inti Rp5 Triliun sampai dengan kurang dari Rp 30 Triliun.
4. BUKU 4, Bank dengan modal inti di atas Rp30 Triliun.

Kegiatan Usaha yang dilakukan Bank Umum Konvensional dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penghimpun dana.
2. Penyaluran dana.
3. Pembiayaan perdagangan (*trade finance*).
4. Kegiatan *treasury*.

5. Kegiatan dalam valuta asing.
6. Kegiatan keagenan dan kerjasama.
7. Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*.
8. Kegiatan penyertaan modal.
9. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit.
10. Jasa lainnya.
11. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan sebagai berikut :

1. BUKU 1 hanya dapat melakukan :
 - a. Kegiatan Usaha dalam Rupiah yang meliputi :
 - 1) Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar.
 - 2) Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar.
 - 3) Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).
 - 4) Kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama.
 - 5) Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas.

- 6) Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit.
 - 7) Jasa lainnya.
- b. Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (FVA)
 - c. Kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. BUKU 2 dapat melakukan :
- a. Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing.
 - 1) Kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1.
 - 2) Kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas.
 - 3) Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).
 - 4) Kegiatan *treasury* secara terbatas.
 - 5) Jasa lainnya.
 - b. Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk :
 - 1) Keagenan dan kerjasama.
 - 2) Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*.
 - c. Kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia.
 - d. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit.

- e. Kegiatan lain yang lazim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. BUKU 3 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia.
4. BUKU 4 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.

Penyertaan modal yang dilakukan pada masing-masing BUKU diantaranya :

1. BUKU 2 paling tinggi sebesar 15% dari modal Bank.
2. BUKU 3 paling tinggi sebesar 25% dari modal Bank.
3. BUKU 4 paling tinggi sebesar 35% dari modal Bank.

Sedangkan untuk kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif yang dilakukan pada masing-masing BUKU diantaranya

1. Paling rendah 55% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 1.
2. Paling rendah 60% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 2.
3. Paling rendah 65% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 3.
4. Paling rendah 70% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 4.

2.1.2 Tingkat Kesehatan Bank

2.1.2.1 Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan salah satu indikator penilaian kesehatan perbankan dalam aspek *Capital*. CAR membandingkan modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menurut Kasmir (2006 : 36) menjelaskan bahwa : “*Capital Adequacy Ratio* adalah perbandingan rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah”

Menurut Bank Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007), CAR adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administrative sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar.

Sedangkan pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menurut Malayu S.P Hasibuan (2006:58) adalah sebagai berikut : “KPPM atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) atau BIS (*Bank for International Settlements*) besarnya 8%. KPPM (CAR/BIS) adalah kebutuhan minimum bank dihitung berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).“

Pengertian *Capital Adequacy Ratio* menurut Lukman Dendawijaya (2009), yaitu : *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva

yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{MODAL}{Aktiva\ Tertimbang\ Menurut\ Risiko}$$

Jadi berdasarkan pendapat-pendapat di atas, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal minimum bank yang digunakan untuk penyangga atau menutupi penurunan aktiva yang mengandung atau dapat menghasilkan risiko dimana modal bank tersebut terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Penyediaan modal minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penilaian kesehatan bank ini berubah-ubah sesuai dengan tingkat keperluan yang dianggap paling tepat. Misalkan tingkat CAR yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun 1999 minimal 8% dan untuk tahun 2001 minimal 12% dan diubah kembali menjadi 8% pada tahun 2003 sampai 2012 sedangkan pada saat terjadi kondisi krisis yang melanda perekonomian dunia di tahun 2008, CAR disyaratkan sebesar minimum 5% agar Bank dapat memenuhi kriteria FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) namun setelah itu kembali diubah sebesar 8% namun pada tahun 2012 peraturan mengenai persyaratan minimum CAR harus ditentukan sesuai profil risiko bank bersangkutan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, penyediaan modal minimum ditetapkan sebagai berikut :

- a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
- b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
- c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga).
- d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko menurut Taswan (2006 :85) Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) menyangkut aktiva yang tercantum dalam neraca bank maupun aktiva yang bersifat administrative sebagaimana pada kewajiban yang masih bersifat kotijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank untuk pihak ketiga. Dalam menghitung ATMR, terhadap masing-masing pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya di dasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri.

Jadi, Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) adalah nilai total aktiva – aktiva yang dimiliki bank yang telah dikalikan dengan bobot resiko. Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko berpedoman pada ketentuan BI tentang dan bobot rasionya dihitung perpersi. Berkaitan

dengan hal tersebut, kegiatan perbankan Indonesia harus mengikuti ukuran yang berlaku secara Internasional.

2.1.2.2 Pengertian *Loan to Deposite (LDR)*

Pengertian *Loan to Deposit Ratio* menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank. Kasmir (2012: 319) mengartikan *Loan to Deposit Ratio* adalah sebagai berikut :

“*Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.”

Sedangkan menurut Sipahutar (2007), *Loan to Deposit Ratio* dinyatakan sebagai :

“LDR (*Loan to Deposit Ratio*) merupakan perbandingan antara kredit yang disalurkan perbankan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit sebagai sumber likuiditasnya. Rasio ini memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Semakin tinggi rasio ini

menggambarkan kurang baiknya likuiditas bank. Oleh karena itu, Bank Indonesia membatasi tingkat *Loan to Deposit Ratio* yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 bahwa batas aman *Loan to Deposit Ratio* berkisar antara 78% sampai dengan 94%. *Loan to Deposit Ratio* mempunyai peranan penting sebagai indikator yang menunjukkan tingkat ekspansi kredit yang dilakukan bank sehingga *Loan to Deposit Ratio* juga dapat digunakan untuk mengukur berjalan tidaknya fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

Loan to Deposit Ratio dapat pula digunakan untuk menilai strategi manajemen suatu bank. Manajemen bank yang konservatif biasanya memiliki kecenderungan *Loan to Deposit Ratio* yang relatif rendah, sebaliknya manajemen yang agresif memiliki *Loan to Deposit Ratio* yang tinggi atau melebihi batas toleransi.

Nilai *Loan to Deposit Ratio* dapat ditentukan melalui suatu formula yang ditentukan oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP mengenai Pedoman Penghitungan Rasio Keuangan yaitu :

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Kredit adalah kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas asset bank umum. Sedangkan dana pihak ketiga meliputi giro, tabungan dan deposito tetapi tidak termasuk deposito antar bank.

2.1.2.3 Pengertian *Non Performing Loan* (NPL)

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit. Menurut Ismail (2010), kredit bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Setiap bank harus mampu mengelola kreditnya dengan baik dalam memberikan kredit kepada masyarakat maupun dalam pengembalian kreditnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kredit bermasalah. Serta menurut Ismail (2010), NPL (*Non Performing Loan*) adalah kredit yang menunggak melebihi 90 hari. Dimana NPL terbagi menjadi Kredit Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Semakin kecil NPL maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Bank dalam melakukan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit.

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial. Kredit bermasalah menjadi bermasalah dapat dikarenakan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal atau pemberi kredit.

Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPL. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah $\leq 5\%$ dari total portofolio kreditnya.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, NPL dapat dihitung dengan rumus :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Kurang Lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Peningkatan NPL dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi.

2.1.3 Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Teguh Pudjo Muljono (2007), kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan sejumlah nominal tertentu yang dipercayakan kepada pihak lain dengan penangguhan waktu tertentu yang dalam pembayarannya akan disertakan adanya tambahan berupa bunga sebagai kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh pihak yang memberikan pinjaman.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini terjadi antara pihak pemberi kredit dan penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan perusahaan, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja.

5. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

2.1.4 *Capital Buffer*

2.1.4.1 *Pengertian Capital Buffer*

Capital buffer didefinisikan sebagai selisih lebih antara rasio kecukupan modal (CAR) yang dimiliki perbankan dengan persyaratan minimum modal perbankan yang diberlakukan regulator (Anggitasari, 2013). Meskipun, Regulasi modal bermanfaat untuk keamanan dan kesehatan bank, mewajibkan bank untuk menahan peningkatan modal yang memiliki banyak biaya dan dapat menjadi kendala terkait perilaku bank.

Capital buffer dapat menjadi pelindung yang dapat menyerap berbagai risiko yang mungkin muncul, jika *financial distress cost* dari modal yang rendah, serta biaya akses modal baru yang tinggi. Selain itu, bank yang

memiliki modal yang rendah, lebih mudah kehilangan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank dapat menahan dan menjadikan *capital buffer* sebagai asuransi untuk menghindari biaya disiplin pasar (*market discipline*) maupun biaya intervensi pengawasan (*Supervisory Intervention*) jika mereka memutuskan untuk menurunkan modal di bawah persyaratan rasio kecukupan modal.

Alasan lain bank harus memiliki *capital buffer* adalah pasar memaksa bank besar untuk memiliki *capital buffer*, bahkan ketika modal relatif mahal, sebagaimana modal bank berfungsi untuk memonitor dan tanpa penjamin simpanan yang memungkinkan bank membuat jaminan simpanan menjadi lebih murah. Jokiipi dan Milne (2007) menyatakan bahwa di saat terjadi peningkatan yang substansial pada permintaan kredit, bank-bank dengan modal yang relatif kecil akan kehilangan pangsa pasar yang baik untuk dikapitalisasi.

Mishkin (2006) menyatakan bahwa bank menahan modalnya berdasarkan beberapa alasan. Pertama, modal bertujuan untuk mengantisipasi kegagalan, Bank menahan modalnya untuk mengurangi risiko tidak solvabel. Bank cenderung memiliki kecukupan modal untuk menyerap kerugian. Kedua, jumlah modal mempengaruhi pengembalian pemegang saham. Semakin besar modal yang ditahan, semakin kecil keuntungan yang diterima pemegang saham. Terdapat situasi dimana manajer harus mengambil keputusan yang optimal di antara menjaga

likuiditas bank tetap aman dan memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Ketiga, modal minimum perbankan diatur oleh regulator.

Terdapat dua jenis perilaku bank dalam mengelola modalnya. Pertama, bank yang melakukan pengamatan ke belakang (*backward-looking*) akan mengurangi *capital buffer* selama periode kredit sangat tinggi (*boom period*) untuk memperluas kegiatan kreditnya. Hasilnya, mereka terlambat mengantisipasi risiko kredit, dan mereka diharuskan menambah cadangan modalnya selama periode resesi. Kedua, bank yang memiliki perilaku pengamatan ke depan (*forward-looking*) dalam mengelola modalnya, akan mengantisipasi resesi ekonomi yang mungkin timbul dengan meningkatkan *capital buffer* selama periode perumbuhan ekonomi yang sangat tinggi (*economic boom*). Ayuso et al (2004) menyajikan bukti empiris mengenai perilaku bank-bank di Spanyol yang menerapkan metode *backward-looking* untuk menunjukkan bahwa modal bank bersifat *procyclical*. Jokipii dan Milne (2008) menemukan hasil serupa mengenai cadangan modal bank-bank di Eropa yang juga bersifat *procyclical* selama periode 1997-2004.

Berbeda dengan hasil tersebut, beberapa penelitian menunjukkan rasio modal bersifat *countercyclical*. Hal ini dikarenakan bank-bank yang menerapkan *forward-looking* melakukan antisipasi terhadap resesi ekonomi selama periode *economic boom* tidak hanya meningkatkan keuntungan, tapi juga meningkatkan cadangan modal untuk menghindari kerugian yang besar jika terjadi resesi ekonomi (Borio et al, 2001). Berger dan Udell (2004) menyatakan bahwa rasio modal bersifat *countercyclical*, dikarenakan

mengembangkan neraca selama periode *economic boom*. Terakhir, penelitian ini juga mengikutsertakan beberapa faktor penentu lainnya yang dapat mempengaruhi *capital buffer* perbankan konvensional di Indonesia. Terdapat dua faktor penentu yang diikutsertakan dalam penelitian ini, seperti *Loans to Total Assets* (LOTA) dan *Bank's Share Assets* (BSA). LOTA dipertimbangkan dalam analisis ini untuk menentukan kondisi pertumbuhan kredit yang tinggi akan berpengaruh dalam mengurangi kapasitas untuk meningkatkan cadangan modal atau tidak. BSA juga dipertimbangkan sebagai independen variabel. Oleh karena itu, penelitian ini perlu membuktikan apakah bank dengan kekuatan pasar yang besar relatif lebih mudah mendapatkan keuntungan, sehingga mendorong bank untuk dapat meningkatkan cadangan modal melalui laba.

2.1.4.2 Faktor Penentu *Capital Buffer*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ayuso, et al. (2002), Jokipii dan Milne (2007), dan Tabak (2011), terdapat tiga jenis biaya yang terkait *capital buffer* yaitu *cost of holding capital*, *cost of financial distress*, dan *adjustment costs*.

1. Cost of Holding Capital

Cost of holding capital menyiratkan dari kelebihan modal (*direct costs of remunerating the excess of capital*), yaitu biaya kesempatan modal (*opportunity cost of the capital*) (Ayuso, et al., 2002). Oleh karena itu, insentif bank untuk menahan modalnya tergantung pada biaya modal (*cost of the capital*) dan biaya deposito (*cost of deposits*).

2. *Cost of Financial Distress*

Menahan modal pada tingkat yang lebih tinggi dapat membuat bank mengurangi probabilitas kebangkrutan bank, dengan demikian hal ini disebut *cost of failure*, termasuk kehilangan nilai perusahaan, kehilangan reputasi, biaya hukum dari proses kebangkrutan (Tabak, 2011).

Biaya ini terkait dengan adanya persyaratan modal wajib minimum. Semakin tinggi modal akan mengurangi risiko ketidakpatuhan terhadap persyaratan tersebut, dengan demikian akan meminimalkan biaya konsekuensi. Faktanya, sebelum batas peraturan tercapai, otoritas pengawasan perbankan biasanya menempatkan beberapa batasan pada aktivitas bank. Profil risiko dari bank menentukan *capital buffer*.

3. *Adjustment Costs*

Bank dihadapkan pada biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dalam rangka mencapai modal yang optimal. *Capital adjustment* yang tidak optimal mengakibatkan kelebihan atau kekurangan modal. Namun, konsekuensi kekurangan modal sepertinya lebih serius, sehingga bank lebih memilih “*over-capitalised*” atau kelebihan modal dibanding “*under-capitalised*” atau kekurangan modal (Fikri, 2012). Dengan kata lain, bagian dari *capital buffer* yang diamati ditujukan untuk pencegahan, sebagian karena friksi dalam penyesuaian tingkat modal.

2.1.5 BI rate

2.1.5.1 Pengertian BI rate

Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat, karena dampaknya yang sangat luas. Bunga bank sendiri dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Sebagaimana yang disebutkan dalam *Inflation Targeting Framework* bahwa BI rate merupakan suku bunga acuan Bank Indonesia dan merupakan sinyal (*stance*) dari kebijakan moneter Bank Indonesia. “BI rate adalah suku bunga instrumen sinyaling Bank Indonesia yang ditetapkan pada RDG (Rapat Dewan Gubernur) triwulanan untuk berlaku selama triwulan berjalan (satu triwulan), kecuali ditetapkan berbeda oleh RDG bulanan dalam triwulan yang sama”. (Bank Indonesia dalam *Inflation Targeting Framework*) Dari pengertian tersebut terlihat jelas bahwa BI rate berfungsi sebagai sinyal dari kebijakan moneter Bank Indonesia, dengan demikian bahwa respon kebijakan moneter dinyatakan dalam kenaikan, penurunan, atau tidak berubahnya BI rate tersebut. Sedangkan menurut Dahlan Siamat menyebutkan bahwa “BI rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (*stance*) kebijakan moneter”. (Dahlan Siamat, 2005;139). Dari pengertian yang dikeluarkan oleh Dahlan Siamat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa BI rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk

mengarahkan agar rata-rata tertimbang suku bunga SBI-1 bulan hasil lelang OPT (Operasi Pasar Terbuka) berada disekitar BI *rate*. Selanjutnya suku bunga SBI-1 bulan tersebut diharapkan akan mempengaruhi suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), suku bunga deposito dan kredit serta suku bunga jangka waktu yang lebih panjang.

Bunga bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar nasabah kepada bank. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI *rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI *rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menentukan tingkat suku bunga berlaku hukum permintaan dan penawaran. Apabila penawaran uang tetap, semakin tinggi pendapatan nasional semakin tinggi tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi dapat memengaruhi investasi walaupun pengaruhnya sangat terbatas. Bank Indonesia menetapkan suku bunga pinjaman bank-bank konvensional pemerintah, suku bunga deposito, tabungan dan juga suku bunga atas pinjaman yang diberikannya kepada bank-bank konvensional pemerintah guna membiayai aktivitasnya memberikan kredit kepada dunia usaha dan masyarakat. Ada tiga istilah yang berkaitan dengan suku bunga, yaitu : *stated rate*, *annual percentage rate*, dan *yield*, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

1. *Stated Rate*

Stated rate adalah tingkat bunga satu periode dikalikan jumlah pokok pinjaman untuk menghitung beban bunga.

2. *Annual Percentage Rate*

Annual percentage rate adalah tingkat bunga disetahunkan dengan menyesuaikan *stated rate* untuk jumlah periode per tahun dan jumlah pokok yang benar-benar dipinjamkan.

3. *Yield*

Yield adalah tingkat bunga yang ekuivalen dengan satu kontak keuangan yang memenuhi tiga syarat : (a) jumlah seluruhnya yang benar-benar dipinjam (dipinjamkan); (b) pada awal tahun; (c) kemudian dibayar kembali pada akhir tahun beserta bunganya.

2.1.6 Inflasi

2.1.6.1 Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga yang sifatnya sementara seperti momen hari raya (tidak terus-menerus) dan kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lain (Samuelson dan Nordhaus, 2004).

Menurut Irving Fisher dalam buku Sadono Sukirno (2012), kenaikan harga-harga umum atau inflasi (P) disebabkan oleh tiga faktor yaitu jumlah uang beredar (M), kecepatan peredaran uang (V), dan jumlah barang yang

diperdagangkan (T). Menurutnya inflasi adalah proses kenaikan harga barang umum yang berlaku dalam perekonomian. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan presentase yang sama. Yang penting terdapat kenaikan harga-harga umum barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Kenaikkan yang terjadi hanya satu sekali saja (meskipun dengan presentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi.

Adapun secara garis besar teori inflasi terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Teori kuantitas, teori ini berdasarkan persamaan $MV=PT$

Menurut teori ini hanya bisa terjadi kalau ada tambahan volume uang yang beredar (kartal maupun giral) tanpa diiringi oleh pasokan (suplai) barang-barang yang tersedia. Inflasi juga dapat terjadi oleh harapan ekspektasi psikologi masyarakat mengenai kenaikan harga dimasa datang.

2. Teori Keynes

Mengemukakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya dan permintaan masyarakat akan barang-barang melebihi jumlah barang yang tersedia.

3. Teori Struktural

Teori ini lebih menekankan penyebab inflasi berasal dari struktur perekonomian yang tidak mampu mengantisipasi secara cepat dan fleksibel atas perkembangan perekonomian yang ada terutama terjadi di negara berkembang. Negara berkembang biasanya hanya menghasilkan

hasil alam dan pertanian yang daya tukarnya tidak berkembang secepat produk industri yang diimpor di negara maju. Negara berkembang juga menghadapi permasalahan kependudukan.

Sedangkan penyebab inflasi dibagi menjadi 3 macam diantaranya :

1. Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total (Agregat Demand) yang berlebihan sementara produksi suplai telah berada pada keadaan kesempatan kerja yang penuh dan tidak mungkin meningkat lagi sehingga penambahan permintaan hanya akan menyebabkan terjadinya perubahan peningkatan harga.

2. Desakan Biaya (*Cost Push Inflation*)

Inflasi ini terjadi akibat harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut naik. Terjadi biaya per unit yang lebih tinggi untuk produksi dan pergeseran kurva penawaran kekiri/lebih sedikit jumlah barang yang ditawarkan pada harga yang sama serta keseimbangan baru dicapai pada harga yang lebih tinggi diikuti penurunan kuantitas yang terjual. Sumber kenaikan biaya produksi ini bisa berasal dari banyak hal misalnya : kenaikan upah buruh, kenaikan harga energi, kenaikan harga bahan baku.

3. Inflasi diimpor (Sadono Sukirno, 2006: 336)

Inflasi yang bersumber dari kenaikan harga barang-barang yang diimpor. Inflasi ini akan terwujud apabila barang-barang impor yang

mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan.

2.1.7 Produk Domestik Bruto

2.1.7.1 Pengertian Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto atau disingkat dengan PDB merupakan suatu pengukuran pendapatan nasional sebuah negara, PDB memberikan gambaran mengenai jumlah output atau barang dan jasa akhir yang diproduksi sebuah wilayah tertentu dalam periode tertentu. Kawasan yang menjadi pengukuran PDB umumnya adalah sebuah negara, provinsi, kabupaten atau kota, jangka waktu yang digunakan pada umumnya setiap satu tahun sekali. Menurut Sukirno, PDB adalah nilai barang dan jasa di dalam sebuah negara yang telah diproduksi dalam kurun waktu 1 tahun oleh faktor-faktor produksi. Baik oleh produksi yang dimiliki oleh negara tersebut maupun negara asing, selama berada pada wilayah negara yang sama. Sedangkan menurut Dornbusch (2004), PDB atau *Gross Domestic Product* (GDP) tercakup dalam tiga definisi penting berikut ini. Pertama, PDB merupakan nilai akhir dari barang dan jasa yang diproduksi sebagai suatu bentuk kegiatan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Kedua, PDB adalah jumlah dari nilai tambah yang berasal dari kegiatan ekonomi selama kurun waktu tertentu. Ketiga, PDB merupakan jumlah dari pendapatan yang muncul dari kegiatan ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Artinya, PDB mencakup tiga unsur penting yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan tingkat PDB, yaitu jumlah dari seluruh nilai akhir barang dan jasa

yang diproduksi, atau jumlah dari nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan, dan atau jumlah dari pendapatan yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa. PDB merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan keadaan perekonomian suatu negara. PDB terbagi ke dalam dua bentuk, diantaranya PDB nominal dan PDB riil. Yang dimaksud dengan PDB nominal adalah PDB dengan harga yang berlaku yaitu nilai barang dan jasa akhir atau nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan sebuah negara dalam suatu tahun yang dinilai dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Sedangkan PDB riil adalah PDB atas dasar harga konstan, yaitu nilai barang dan jasa akhir atau nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan sebuah negara dalam suatu tahun yang dinilai dengan menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDB riil digunakan untuk dapat menghasilkan pengukuran pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik. Hal ini dikarenakan PDB riil menggunakan harga konstan, sehingga lebih fokus dalam menilai peningkatan nilai output yang dihasilkan. Jika harga berlaku yang digunakan, setiap tahunnya PDB akan mengalami peningkatan dikarenakan adanya inflasi dan belum tentu disebabkan oleh peningkatan jumlah volume produksi.

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam membentuk PDB, yaitu menggunakan pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran (BPS). Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. PDB menggunakan pendekatan produksi

Melalui pendekatan produksi, PDB dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah dari setiap proses produksi yang dilakukan dalam sebuah negara dari berbagai lapangan usaha untuk periode tertentu (1 tahun). Dengan metode ini PDB dapat pula dihitung dengan cara mengalikan barang dan jasa akhir yang dihasilkan sebuah negara dalam satu tahun dengan harga satuan masing-masing output. Terdapat sembilan lapangan usaha yang memengaruhi PDB dalam pendekatan produksi, yaitu: (a) Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; (b) Pertambangan dan penggalan; (c) Industri pengolahan; (d) Listrik, gas dan air bersih; (e) Konstruksi; (f) Perdagangan, hotel, dan restoran; (g) Pengangkutan dan komunikasi; (h) Keuangan, real estate, dan jasa perusahaan; dan (i) Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

2. PDB menggunakan pendekatan pendapatan

Pendekatan pendapatan memberi gambaran bahwa PDB terbentuk dari pendapatan sesuai dengan definisi yang dimiliki PDB. Pendapatan ini adalah suatu bentuk balas jasa yang diterima oleh penyedia faktor-faktor produksi. Pemilik tanah/sumber daya alam akan memperoleh sewa, pemilik tenaga kerja memperoleh balas jasa berupa upah/gaji, pemilik modal yang melakukan investasi akan memperoleh bunga sebagai imbalan, dan pemilik perusahaan akan memperoleh laba. Penjumlahan atas sewa, upah/gaji, bunga, dan laba ini yang kemudian

akan menghasilkan PDB bagi suatu negara dalam periode waktu satu tahun.

3. PDB menggunakan pendekatan pengeluaran

Pendekatan pengeluaran yang digunakan dalam menilai PDB menggunakan jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga pelaku ekonomi sebuah negara selama periode satu tahun. Adapun pengeluaran yang dilakukan mencakup konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Konsumsi merupakan bentuk pengeluaran rumah tangga dalam membeli barang dan jasa. Investasi merupakan suatu pengeluaran untuk persediaan atau pembelian barang modal. Pengeluaran pemerintah mencakup semua barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah untuk mendukung bergeraknya roda perekonomian. Ekspor bersih (net export) merupakan selisih nilai ekspor dan impor barang dan jasa dalam suatu negara dalam periode setahun.

Secara teoritis ketiga pendekatan di atas akan menghasilkan nilai yang sama terhadap pengukuran PDB. Namun akan lebih sulit untuk mengetahui nilai pendapatan yang diperoleh dari output suatu negara, oleh karena itu di dalam perhitungan PDB yang sering digunakan yakni pendekatan pengeluaran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkaya perspektif penelitian ini, selain dari kajian teori yang telah dijelaskan, dilakukan pula *review* perihal penelitian sebelumnya.

Berikut tabel 2.2 di bawah ini tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tujuan	Hasil Penelitian	Perbedaan Variabel Penelitian
1	Bambang Pramono, dkk (Desember 2015)	Dampak Kebijakan <i>Countercyclical Capital Buffer</i> Terhadap Pertumbuhan Kredit di Indonesia (Periode 2005-2015)	menganalisis dampak implementasi kebijakan CCB terhadap pertumbuhan kredit di Indonesia	Variabel CAR, Total Aset, ROA, PDB, BI <i>rate</i> dan CCB berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan kredit secara simultan. Sedangkan secara parsial pengaruh CAR (-), Total Aset (+), ROA (+), PDB (+), BI <i>rate</i> (-) berpengaruh signifikan sedangkan CCB (-) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.	Total Aset dan ROA.
2	Puji Purwanti (2010)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum di Jawa Tengah Tahun 1993-2008	menganalisis pengaruh PDB, suku bunga rill kredit, inflasi, dan krisis ekonomi terhadap permintaan kredit bank umum di Jawa Tengah	Variabel PDB, suku bunga rill kredit, inflasi dan krisis ekonomi berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit bank umum secara simultan. Sedangkan secara parsial pengaruh PDB (+), suku bunga rill kredit (-), inflasi (+) dan krisis ekonomi (+) berpengaruh signifikan semua terhadap permintaan kredit.	Suku bunga rill kredit dan krisis ekonomi.
3	Luh Rahmi Susanti (2010)	Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Pertumbuhan Kredit Pada Bank Umum di Indonesia Periode 2002-2009	Menganalisis pengaruh perubahan variabel makroekonomi yang terdiri atas PDB, SBI, laju inflasi, jumlah uang beredar, nilai tukar rupiah, dan harga minyak secara keseluruhan terhadap pertumbuhan kredit bank umum	Variabel PDB, SBI, laju inflasi, jumlah uang beredar, nilai tukar rupiah, dan harga minyak berpengaruh dan signifikan terhadap penyaluran kredit secara simultan. Sedangkan secara parsial pengaruh PDB (+), SBI (+), inflasi (-), JUB (-), nilai tukar rupiah (+), harga minyak (+) berpengaruh signifikan semua kecuali SBI, Inflasi, JUB dan Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.	SBI, JUB, Nilai tukar rupiah dan Harga minyak dunia.
4	Dwi Fitriani (2012)	Pengaruh Rasio Keuangan Bank Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2010)	Menganalisis pengaruh rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas terhadap penyaluran kredit modal kerja pada bank umum di Indonesia.	Variabel CR, LDR, <i>Primary Ratio</i> , CAR, NPM, ROA dan Aset Utilization berpengaruh dan signifikan terhadap jumlah kredit modal kerja secara simultan. Sedangkan secara parsial pengaruh CR (-), LDR (+), <i>Primary Ratio</i> (+), CAR (+), NPM (+), ROA (+), Asset (+) berpengaruh terhadap kredit modal kerja.	CR, <i>Primary Ratio</i> , NPM, ROA dan Aset Utilization.

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

5	William Lie dan Mariana Ing Malelak (2015)	Pengaruh Makroekonomi Terhadap Kredit Perbankan di Indonesia Periode 2007-2014	Menganalisis variabel inflasi, suku bunga Bank Indonesia, jumlah uang beredar, kurs, ekspor dan PDB	Variabel inflasi, suku bunga Bank Indonesia, jumlah uang beredar, kurs, ekspor dan PDB berpengaruh dan signifikan terhadap penyaluran kredit secara simultan. Sedangkan secara parsial pengaruh JUB (+) dan PDB (+) berpengaruh signifikan sedangkan inflasi (+), kurs (-), suku bunga bank Indonesia (+), dan ekspor (+) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.	JUB, kurs dan ekspor
6	Annethe Runtalalo, Robby Kumaat dan Avriano Tenda (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Investasi Pada Bank Umum di Sulawesi Utara (Periode 2009.1-2013.4)	Menganalisis pengaruh dari SBK, DPK dan NPL terhadap pertumbuhan kredit investasi.	Variabel SBK, DPK dan NPL berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan kredit investasi secara simultan. Sedangkan secara parsial pengaruh SBK (-), DPK (+) dan NPL (+) berpengaruh signifikan semua terhadap pertumbuhan kredit investasi.	SBK dan DPK
7	Gentur Jalunggono (2016)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Modal Kerja Bank Umum di Kabupaten Banyumas	Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat inflasi, <i>Non Performing Loans</i> (NPL) dan <i>BI rate</i> terhadap penyaluran kredit modal kerja bank umum di Kabupaten Banyumas	Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), tingkat inflasi, <i>Non Performing Loans</i> (NPL) dan <i>BI rate</i> berpengaruh dan signifikan terhadap kredit modal kerja secara simultan. Sedangkan secara parsial pengaruh DPK (+), Inflasi (+), NPL (+) dan <i>BI rate</i> (+) berpengaruh signifikan semua terhadap kredit modal kerja.	DPK
8	Syamsul Bahri (2013)	Analisis Pengaruh Faktor-faktor Variabel Moneter Terhadap Total Kredit Perbankan di Indonesia	Menganalisis Pengaruh Nilai Tukar, DPK, Inflasi Terhadap Total Kredit	Variabel nilai tukar, DPK dan inflasi berpengaruh dan signifikan terhadap total kredit secara simultan. Sedangkan secara parsial pengaruh Nilai tukar (+), DPK (+), inflasi (+) berpengaruh signifikan semua terhadap total kredit.	Nilai tukar dan DPK
9	Andrea Caroline dan Marya Lu (2012)	Pengaruh Spread Tingkat Suku Bunga dan Rasio Keuangan terhadap Penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum di Indonesia periode 2008-2011	Untuk mengetahui pengaruh spread tingkat suku bunga, CAR, LDR, dan NPL terhadap penyaluran kredit UMKM	Variabel Spread, CAR, LDR dan NPL berpengaruh dan signifikan terhadap penyaluran kredit secara simultan. Sedangkan secara parsial pengaruh Spread (-), CAR (-), LDR (-) dan NPL (-) berpengaruh signifikan semua terhadap total kredit	Spread

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

10	Serli (2016)	Pengaruh DPK, NPL CAR, ROA, BOPO, SUKU BUNGA Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus Industri Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014)	Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga, LDR, NPL, CAR, ROA, BOPO, Suku bunga Terhadap Penyaluran Kredit	Variabel DPK, LDR, NPL, CAR, ROA, BOPO, Suku Bunga berpengaruh dan signifikan terhadap penyaluran kredit secara simultan. Sedangkan secara parsial DPK (+), LDR (+), NPL (+), CAR (-), BOPO (-), Suku Bunga (+) berpengaruh signifikan semua terkecuali CAR, LDR, NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.	DPK, BOPO dan Suku Bunga Bank
11	Pratama (2009)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Kasus pada Bank Umum di Indonesia periode 2005-2009)	Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit.	Variabel DPK, CAR, NPL dan SBI berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit secara simultan. Sedangkan secara parsial DPK (+), CAR (-) NPL (-) dan SBI (+) berpengaruh signifikan semua kecuali CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap penyaluran kredit.	DPK dan SBI
12	I Gede Oggy Pratama Putra (2015)	Pengaruh DPK, BI rate dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada BPR di Provinsi Bali Tahun 200-2014	Menganalisis pengaruh DPK, BI rate dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja	Variabel DPK, BI rate dan NPL berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit secara simultan. Sedangkan secara parsial DPK (+), BI rate (+) dan NPL(+) berpengaruh signifikan semua terhadap penyaluran kredit .modal kerja.	DPK
13	Eko Satria Prbaowo (2018)	Pengaruh Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, dan BI rate Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016)	Menganalisis pengaruh NPL, CAR dan BI rate Terhadap Penyaluran Kredit	Variabel NPL, CAR dan BI rate berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit secara simultan. Sedangkan secara parsial NPL (+), CAR (+) dan BI rate (+) tidak berpengaruh signifikan semua terkecuali BI rate berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.	-
14	Putri Andini, Leny Susand dan Dewa PK Mahardika (2016)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BI rate dan BOPO Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan	Menganalisis pengaruh DPK, BI rate dan BOPO Terhadap Penyaluran Kredit	Variabel DPK, BI rate dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit secara simultan. Sedangkan secara parsial DPK (+), BI rate (+) dan BOPO (-) berpengaruh signifikan semua terkecuali BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.	DPK dan BOPO

2.3 Kerangka Pemikiran

Bank dalam penyaluran kreditnya dipengaruhi baik oleh faktor eksternal maupun faktor internal dari bank bersangkutan. Faktor internal bank meliputi kemampuan bank dalam menghimpun dana *financial position* (CAR, aktiva tertimbang menurut resiko, batas maksimum pemberian kredit), kualitas aktiva produktifnya dan faktor produksi yang tersedia di bank, sedangkan faktor eksternal meliputi peraturan moneter yang berlaku, persaingan situasi sosial politik, karakteristik usaha nasabah, suku bunga dan sebagainya (Teguh Pudjo Muljono, 2006). Di dalam penelitian ini, terdapat faktor-faktor internal, eksternal dan kebijakan *Capital Buffer* yang diduga berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan kredit tersebut, faktor-faktor tersebut antara lain CAR (*Capital Adequacy Ratio*), LDR (*Loan to Deposit Ratio*), NPL (*Non Performing Laon*), PDB, Inflasi, BI *rate*, dan kebijakan *Capital Buffer*.

Rasio CAR yang dimiliki oleh bank berkaitan dengan penyaluran kredit karena terdapat ketentuan yang menjadi persyaratan oleh otoritas moneter terkait besaran rasio CAR tersebut, sehingga penyaluran kredit oleh bank dipengaruhi oleh besarnya kecukupan modal yang dimiliki oleh bank. Rasio LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio LDR harus dijaga agar tetap sesuai dengan aturan serta batas toleransi yang berlaku, penetapan standar batas bawah dan batas atas untuk rasio LDR yaitu sebesar 78% sampai 94%. Rasio LDR yang

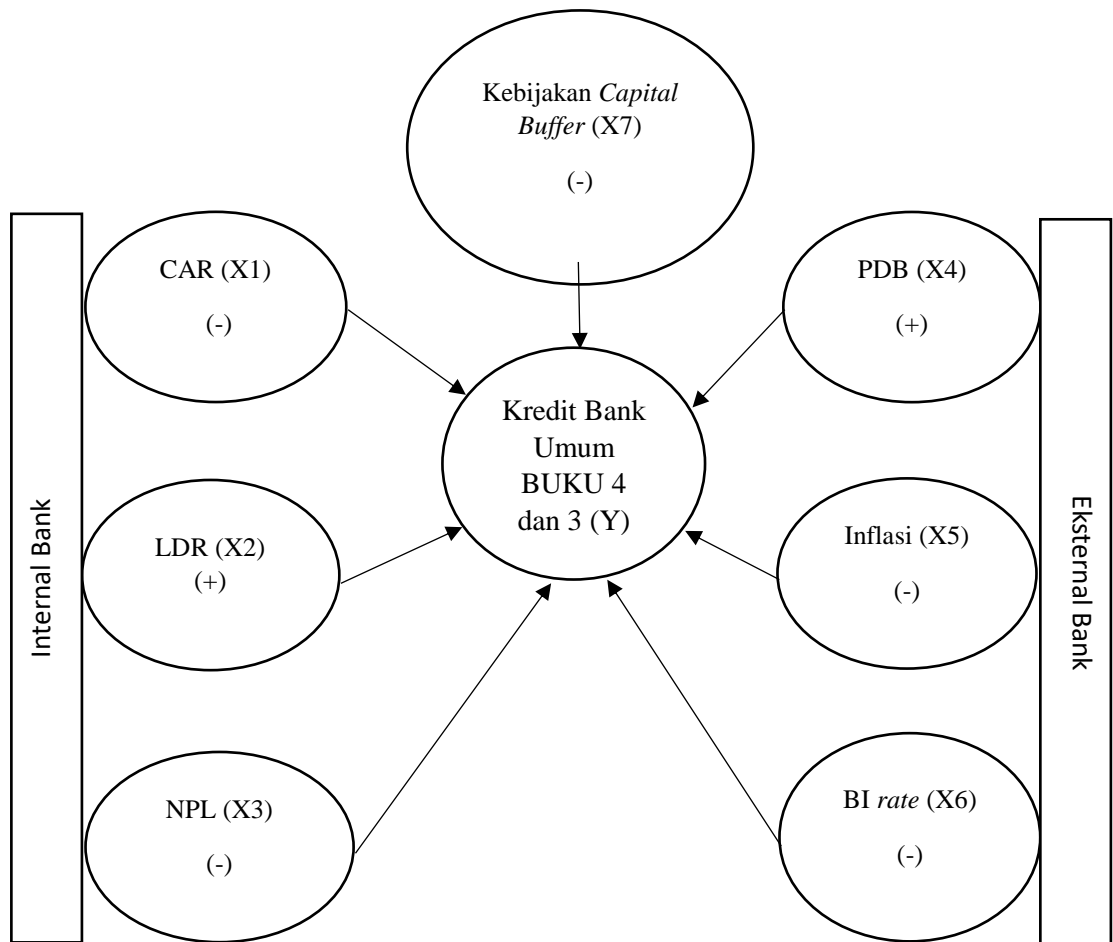
tinggi akan menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau menjadi tidak likuid sedangkan rasio LDR yang rendah menunjukkan bank tersebut likuid dengan kelebihan kapasitas dana untuk dipinjamkan. Rasio NPL merupakan rasio kredit yang bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, peningkatan NPL dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi.

PDB (Produk Domestik Bruto) merupakan jumlah nilai yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor-sektor ekonomi) dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu, nilai PDB menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian di suatu negara, maka apabila peningkatan nilai PDB besar akan dapat menarik minat pihak yang kelebihan dana atau investor untuk berinvestasi karena adanya prospek yang baik untuk kedepannya, sehingga dana dari investor tersebut akan berdampak pada kredit yang akan disalurkan bank kepada pihak yang kekurangan dana. Secara umum inflasi akan mengurangi daya beli seseorang apalagi bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi ini akan sangat merugikan. Inflasi juga akan menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Namun bagi orang yang meminjam uang kepada bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam.

Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang riil pada saat pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman, oleh karena itu inflasi akan berpengaruh terhadap penyaluran kredit, dan pengaruh BI *rate* terhadap penyaluran kredit bank umum, apabila turunnya tingkat suku bunga Bank Indonesia maka akan direspon dengan turunnya tingkat suku bunga kredit dan suku bunga deposito bank umum, yang akan berdampak pada peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat sedangkan pengaruh kebijakan *Capital Buffer* terhadap penyaluran kredit, kebijakan *Capital Buffer* ini bertujuan sebagai pelindung yang dapat menyerap berbagai risiko kerugian yang mungkin muncul dari pertumbuhan kredit yang berlebihan maupun pada saat periode krisis berlangsung, jika *financial distress cost* dari modal yang rendah, serta biaya akses modal baru yang tinggi serta adanya *capital buffer* untuk mengurangi prosiklikalitas serta mensyaratkan bank dan institusi keuangan yang bersifat sistemik menyediakan *buffer*. Bank dapat menahan dan menjadikan *capital buffer* sebagai asuransi untuk menghindari biaya disiplin pasar (*market discipline*) maupun biaya intervensi pengawasan (*supervisory intervention*) jika mereka memutuskan untuk menurunkan modal di bawah persyaratan rasio kecukupan modal (CAR).

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik sebuah alur diagram kerangka pemikiran berdasarkan perilaku perbankan pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

1. Diduga variabel LDR (X2) secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit (Y) Bank Umum Konvensional kelompok BUKU 4 dan 3 periode 2005 sampai 2017 di Indonesia.
2. Diduga variabel NPL (X3) secara parsial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit (Y) Bank Umum Konvensional kelompok BUKU 4 dan 3 periode 2005 sampai 2017 di Indonesia.

3. Diduga variabel PDB (X4) secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kredit (Y) Bank Umum Konvensional kelompok BUKU 4 dan 3 periode 2005 sampai 2017 di Indonesia.
4. Diduga variabel BI *rate* (X5) secara parsial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit (Y) Bank Umum Konvensional kelompok BUKU 4 dan 3 periode 2005 sampai 2017 di Indonesia.
5. Diduga kebijakan penetapan *Capital Buffer* (X7) secara parsial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit (Y) Bank Umum Konvensional kelompok BUKU 4 dan 3 periode 2005 sampai 2017 di Indonesia.
6. Diduga secara simultan variabel CAR (X1), LDR (X2), NPL (X3), PDB (X4), BI *rate* (X5), Inflasi (X6) dan kebijakan penetapan *Capital Buffer* (X7) berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit (Y) Bank Umum Konvensional kelompok BUKU 4 dan 3 periode 2005 sampai 2017 di Indonesia.

